

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah antara lain pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah di atur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah yang baik dapat terwujud apabila di dukung oleh kompetensi SDM, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan kualitas reviu yang baik (Maulana, dkk, 2017).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditugaskan melaksanakan reviu atas laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terhadap informasi yang disajikan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017 pada Pasal 33 ayat (3). Reviu merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh APIP selain audit, evaluasi, konsultasi dan kegiatan pengawasan lain. Reviu dilaksanakan dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Laporan keuangan adalah bukti pertanggungjawaban yang diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerahnya. Penelitian Widyarini (2015) menyebutkan bahwa kualitas reviu dinilai berdasarkan pada sistem pengendalian intern, sedangkan penelitian Amirullah et al. (2010) menyebutkan bahwa reviu atas LKPD dipengaruhi oleh kompetensi dan komitmen organisasi dari auditor pelaksana reviu. Hal ini didukung penelitian Eda et al. (2017) yang juga menyebutkan bahwa kompetensi dari auditor APIP berpengaruh positif terhadap kualitas reviu.

Kompetensi staf akuntansi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Hasil penelitian Maulana, dkk (2017), membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian Kusuma dan Darmansyah (2017), yang memberikan hasil kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi dan akan berusaha untuk memberikan hasil kinerja yang lebih baik, seperti memberikan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Sanjaya, 2017). Hasil penelitian Maulana, dkk (2017), membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian Sanjaya (2015), yang memberikan hasil komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kesalahan dalam penyajian LKPD diharapkan dapat dikurangi dengan adanya reviu. Reviu yang berkualitas akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam LKPD. De Angelo 1981 dalam Watkins et al (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pengertian tentang kualitas audit tersebut maka yang dimaksud kualitas reviu adalah kemampuan APIP untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dan sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Ressel (2000) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan kualitas

tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya, demikian halnya dalam reuiu.

Secara teknis reuiu berbeda dengan audit operasional yang biasa dilakukan oleh APIP Inspektorat. Namun, baik reuiu maupun audit keduanya memerlukan keahlian khusus dibidang akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti penelitian dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi pemerintah maupun SAP. Sementara pelatihan akuntansi dapat membantu membantu APIP yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda untuk memahami SAP. Hasil penelitian Widyarini (2015), membuktikan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas reuiu, hasil penelitian Batubara (2008), yang memberikan hasil latar belakang pendidikan tidak berpengaruh kualitas reuiu.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Maulana et al (2017), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas reuiu dan pengaruh kualitas reuiu terhadap kualitas LKPD. Yang berbeda dengan penelitian sekarang adalah 1) pengujian pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, latar belakang pendidikan terhadap kualitas reuiu dan kualitas reuiu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dilakukan oleh Maulana et al (2017). 2) Lokasi penelitian di BPKP Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

permasalahan kualitas reviu dan kualitas LKPD menjadi salah satu yang penting diperhatikan oleh para auditor di inspektorat pemerintah daerah provinsi jawa tengah. Tujuan utama untuk mengevaluasi kinerja para auditor agar lebih independen dalam memberikan kualitas reviu dan kualitas LKPD. Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan reviu. Auditor harus memiliki pengetahuan dan memahami entitas yang diaudit, serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Komitmen organisasi merupakan perilaku auditor untuk berusaha bersikap dan berperilaku untuk mencintai dan merasa memiliki organisasi, sehingga bisa sebagai kekuatan atau dorongan bagi pagawai untuk berkorban kepada instansi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan bahwa auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S1) atau yang setara. Kualitas reviu harus menuhin komponen yang terdapat dalam Standar Reviu atas LKPD (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2015), Pernyataan Telah Direviu dari Inspektur sebagai dasar pembuatan Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah yang menyertai Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda dan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas reviu ?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas reviu ?
3. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas reviu ?
4. Bagaimana pengaruh kualitas reviu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas reviu.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas reviu.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas reviu.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas reviu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai analisis pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern terhadap kualitas reviu dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta dapat digunakan sebagai dasar acuan perluasan penelitian yang berkaitan dengan kualitas reviu dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi BPKP

Dalam penelitian ini diharapkan membantu untuk mengevaluasi kinerja para auditor agar lebih independent dan dalam memberikan kualitas reviu dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi referensi dan landasan bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti kembali dengan kajian yang sama yaitu kualitas reviu dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.